



KUTAI TIMUR

Dalam
SEPEKAN



Pemkab Kutim Optimalkan Zakat, Bupati Ajak ASN Tunaikan ZIS Melalui Baznas

Sangatta - 14 Januari 2025

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyebut zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki dasar hukum agama sekaligus telah diatur dalam regulasi negara. Ia menegaskan bahwa pengelolaan zakat yang terorganisir melalui Baznas akan memberikan manfaat yang lebih luas dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga instrumen sosial yang sangat penting untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Negara telah mengatur pengelolaannya melalui Baznas agar penyalurannya transparan, akuntabel, dan tepat guna," ujar Ardiansyah saat memberikan sambutan pada kegiatan Koordinasi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Tahun 2026, yang berlangsung Ruang Meranti, Kantor Sekretariat kabupaten, Kawasan pemerintahan Bukit Pelangi,

Bupati juga menekankan pentingnya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kutim yang beragama Islam untuk menunaikan zakat melalui mekanisme pemotongan gaji sebesar 2,5 persen setiap bulan.

Menurutnya, dengan komitmen bersama dari seluruh ASN dan perangkat daerah, potensi zakat di Kutai Timur dapat dimaksimalkan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta bantuan sosial lainnya.

Ketua Baznas Kutai Timur Masnif dalam sambutan sekaligus sosialisasinya menyampaikan bahwa Baznas terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan ASN akan pentingnya zakat, infak, dan sedekah sebagai pilar utama dalam pembangunan sosial umat.

"Baznas Kutim berkomitmen mengelola dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional dan transparan. Dana yang terhimpun kami salurkan melalui berbagai program, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat".

Masnif Ketua Baznas Kutai Timur

Saya mengajak dan mengimbau seluruh ASN Kutai Timur yang beragama Islam agar menunaikan zakatnya melalui pemotongan gaji sebesar 2,5 persen setiap bulan. Inshaallah, zakat yang kita keluarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk program-program yang bermanfaat,

Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si

Bupati Kutai Timur

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Baznas Kutai Timur juga menyerahkan Bantuan Pelunasan Biaya Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebesar Rp76 juta. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Baznas Kutim Masnif, didampingi Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutim, serta Kepala Dinas Kesehatan Kutim, dan diterima langsung oleh Direktur RS Kudungga.



DISKOMINFO
STAPOR KUTIM

Kutai Timur Dalam Sepekan

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK

Beasiswa Baznas Kutim Tembus Al Azhar Mesir, Fokus untuk Masyarakat Kurang Mampu

Sangatta - 14 Januari 2025

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan menjadi bagian dari program unggulan yang di canangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Salah satunya melalui program stimulus pendidikan atau beasiswa.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, mengungkapkan bahwa saat ini program beasiswa yang di hadirkan bagi Masyarakat cukup beragam. Tidak hanya menyasar pendidikan dasar (SD, SMP dan SMA) namun saat ini juga sudah mengarah jenjang ke perguruan tinggi.

Melalui Badan Amil Zakat (Baznas) pemerintah daerah mengalokasikan program beasiswa tidak hanya di perguruan tinggi dalam negeri namun juga luar negeri. Salah satunya di Universitas terkemuka Al Azhar Kairo Mesir.

Program beasiswa ini menurut orang nomor satu di Kutim ini, di prioritaskan bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, saat ini, program tersebut juga hanya akan mengarah kepada jurusan keagamaan khususnya agama islam.

"Program ini bukan untuk semua perguruan tinggi umum, Dan itu pun diperuntukkan bagi mahasiswa yang memang tidak mampu," tegasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Baznas Kutim, Masnif Sofwan, menyebut, saat ini program tersebut sudah berjalan. Tercatat sebanyak lima mahasiswa asal Kutim yang tengah menempuh pendidikan di Al Azhar. Dimana saat ini sudah memasuki tahun kedua pendidikan atau masuk semester 4.

Dirinya berharap program ini mampu mencetak generasi yang mampu membantu dan mengisi setiap proses pembangunan yang di canangkan oleh Pemerintah Daerah. terutama dari sisi spiritual "Mudah-mudahan nanti dalam empat tahun kita sudah mendapatkan ulama baru dari sana," pungkasnya.



Drs. K.H. Masnip Sofyan

Ketua Baznas Kutai Timur

"program ini mampu mencetak generasi yang mendukung pembangunan daerah, khususnya dari sisi spiritual. "Mudah-mudahan dalam empat tahun ke depan lahir ulama-ulama baru,"

CEREMONIAL PENYERAHAN
SK KETUA DEWAN PENGAWAS (DEWAS)
BAZNAS KUTAI TIMUR

baznaskabkutim

kabupaten kutai

kabkutaitimur.baznas.go.id

082148855955

penyerahan Surat Keputusan (SK) Ketua Dewan Pengawas Baznas Kutai Timur kepada Sudirman Latif, yang diserahkan langsung oleh Bupati Kutai Timur.



**DISKOMINFO
STAPER KUTIM**

Kutai Timur Dalam Sepekan

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Santia Widyadarmasari

Rapat Monev MBG Kutim Bahas Kendala Aksesibilitas dan Progres SPPG

Sangatta - 14 Januari 2025

Satuan Tugas (Satgas) program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar rapat monitoring dan evaluasi MBG di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Rapat yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setkab Kutim Trisno berlangsung di ruang rapat Diskominfo Staper, Rabu,

Hadir pada rapat yang berlangsung secara daring (zoom meeting) ini, Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Kutim, Dwi Nur Shinta, Perangkar Daerah (PD) terkait termasuk para mitra yang akan melaksanakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Dwi Nur Shinta Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kabupaten Kutim, menyebut rencana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebanyak 95 titik. Dengan rincian untuk usulan pertama terdapat 73 titik dan selanjutnya sebanyak 22 titik. Namun pada pelaksanaannya masih ada beberapa SPPG yang belum berjalan.

Menurutnya, persoalan aksesibilitas menjadi persoalan utama terutama di daerah pedalaman dan pesisir yang belum memiliki akses jalan yang representatif. Sehingga menghambat distribusi bahan baku dan peralatan untuk program MBG. Contohnya di Kecamatan Muara Ancalong.

Sementara itu, Asisten Pemkesra Trisno menyebut, tujuan adanya rapat ini bertujuan untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Serta mengetahui kendala maupun persoalan yang menghambat proses pelaksanaan MBG di Kutim

Dirinya juga berharap kepada seluruh mitra agar mengoptimalkan seluruh proses pelaksanaan untuk mendukung program MBG di Kutim. termasuk menjalin koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

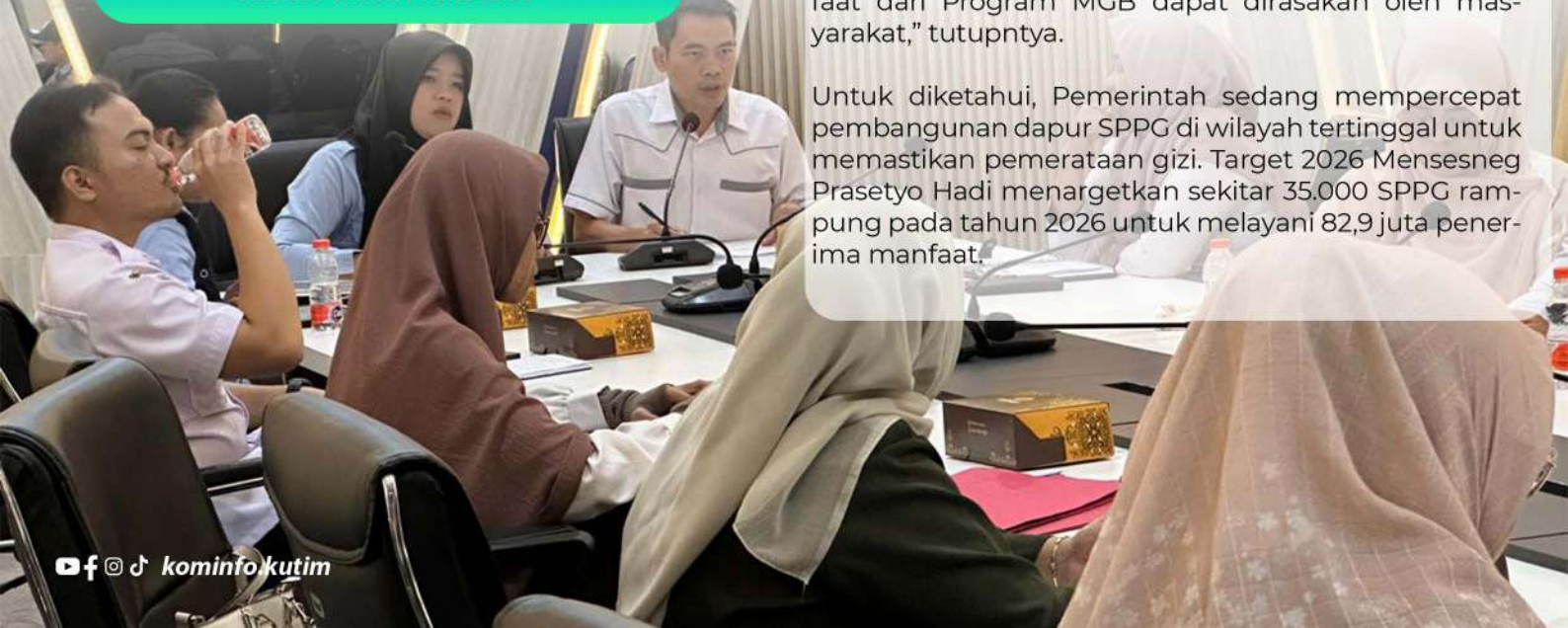
"Ke depannya dapat segera terealisasi, sehingga manfaat dari Program MGB dapat dirasakan oleh masyarakat," tutupnya.

Untuk diketahui, Pemerintah sedang mempercepat pembangunan dapur SPPG di wilayah tertinggal untuk memastikan pemerataan gizi. Target 2026 Mensesneg Prasetyo Hadi menargetkan sekitar 35.000 SPPG rampung pada tahun 2026 untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat.



Trisno

Asisten Pemkesra Kutai Timur



Tingkatkan Kualitas Hidup Lansia, DPPKB Kutim Luncurkan Program Sidaya 2026

Sangatta - 15 Januari 2025

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) akan meluncurkan program Lansia berdaya atau Sidaya. Sebuah program berbasis pendidikan (sekolah) yang menyasar kepada warga berusia diatas 60 tahun. Yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan memiliki pengetahuan kesehatan yang mumpuni.

Program yang akan launching di bulan Februari 2026 tersebut, Kecamatan Sangatta Utara akan menjadi lokasi pertama (percontohan) untuk pelaksanaan program Sidaya yang diharapkan mampu menjadi pilot project untuk pelaksanaan di seluruh wilayah lain di Kutim.

Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan verifikasi dan validasi data lapangan sebelum resmi di luncurkan.

Pihaknya mengaku. Strategi pelaksanaan Sidaya tidak akan membebani APBD, melainkan mengedepankan asas kolaborasi lintas sektor. Kegiatan belajar mengajar nantinya memanfaatkan fasilitas publik yang sudah tersedia di tingkat kelurahan dan desa, seperti balai desa hingga tempat ibadah.

"Kita tidak perlu membangun bangunan baru, yang penting ada tempat berkumpul. Strateginya adalah kerja sama dengan Camat dan Kepala Desa. Untuk tenaga pakarnya, kita gandeng Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga pihak rumah sakit sebagai fasilitator," imbuhnya.

Sedangkan untuk metode pembelajaran termasuk kurikulum yang di gunakan, sekolah ini menerapkan sistem penjenjangan yang disebut Standar 1 (S1) hingga Standar 3 (S3). Para siswa diwajibkan mengikuti 12 kali pertemuan dalam satu jenjang dengan disiplin kehadiran yang ketat sebagai syarat kelulusan.

"Ini bukan sarjana, tapi Standar 1, 2, dan 3. Syarat lulusnya minimal 80 persen kehadiran. Jika lulus, kita berikan sertifikat dan kita wisuda agar mereka bisa lanjut ke tingkat berikutnya untuk belajar merawat diri dan tetap sehat di usia senja," pungkasnya.



"Sekolah Lansia ini belum ada di Kutai Timur, makanya di tahun 2026 akan kita launching. Diperkirakan paling lambat akhir Januari ini persiapannya rampung,"



Pemkab Kutim Tegaskan Komitmen Percepatan Pembangunan Tahun Anggaran 2026

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada Tahun Anggaran 2026. Hal tersebut ditegaskan dalam Supervisi Pelaksanaan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (RADALOK) Ke-I Tahun 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi, dalam arahnya meminta seluruh kepala perangkat daerah agar lebih fokus pada percepatan realisasi fisik dan keuangan sejak awal tahun anggaran.

"Percepatan realisasi program dan kegiatan harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah agar target pembangunan yang telah direncanakan dapat tercapai tepat waktu," tegas Rizali Hadi dalam surat supervisi yang ditandatangani, Kamis (15/1/2026).

Ia menyampaikan, hasil RADALOK Ke-I yang digelar pada 7 Januari 2026 menunjukkan perlunya langkah konkret untuk mendorong optimalisasi kinerja perangkat daerah. Salah satu target yang ditetapkan adalah realisasi fisik dan keuangan Triwulan I minimal mencapai 15 persen.

"Kami menetapkan target Triwulan I sebesar 15 persen sebagai bentuk komitmen awal dalam mengawal pelaksanaan program tahun 2026," ujarnya.

Rizali Hadi juga menekankan bahwa capaian realisasi tersebut akan menjadi salah satu indikator penilaian kinerja kepala perangkat daerah. Oleh karena itu, ia meminta seluruh OPD segera menayangkan paket pekerjaan ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya kesiapan dokumen pendukung sebelum pelaksanaan kegiatan, terutama untuk pekerjaan strategis dan multiyears.

"Dokumen pendukung seperti perizinan, KAK, DED, kesiapan lahan, hingga penetapan lokasi harus dipastikan rampung agar tidak menjadi penghambat pelaksanaan di lapangan," jelasnya.

Menurutnya, percepatan penyerapan anggaran harus tetap diiringi dengan kualitas pelaksanaan program dan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Bukan hanya soal serapan anggaran, tetapi bagaimana output dan outcome kegiatan benar-benar dirasakan masyarakat," tambah Rizali.

Sebagai bagian dari pengendalian, Sekda Kutim meminta setiap perangkat daerah melakukan monitoring rutin melalui rapat internal bulanan dan melaporkan perkembangannya melalui aplikasi TEPRa.

Ia juga memastikan bahwa RADALOK II untuk evaluasi Triwulan II akan dilaksanakan pada minggu pertama Juli 2026.

"RADALOK bukan sekadar forum evaluasi, tetapi sarana pengendalian agar seluruh program berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran," pungkasnya.

Dengan supervisi RADALOK Ke-I ini, Pemkab Kutai Timur berharap pelaksanaan pembangunan tahun 2026 dapat berjalan lebih optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.





DISKOMINFO
STAPER KUTIM

Kutai Timur Dalam Sepekan

#bangga
melayani
bangsa
BerAKHLAK
Berakhlak Melayani Bangsa
Berakhlak Melayani Bangsa

Tingkatkan Populasi Ternak untuk Dukong Ketahanan Pangan Daerah

Sangatta - 20 Januari 2025

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus berupaya memperkuat sektor peternakan sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan daerah. Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Bidang Peternakan DTPHP Kutim, Cut Meutia, saat ditemui di Lab Peternakan DTPHP Kutim, Selasa (20/01/2026).

Cut Meutia menjelaskan bahwa fokus utama DTPHP Kutim pada tahun ini adalah peningkatan populasi seluruh jenis ternak, baik unggas maupun ternak ruminansia. Seperti sapi dan kambing. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan ketersediaan pangan hewani bagi masyarakat Kutai Timur.

"Selain itu, kami juga memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok peternak yang memiliki kemauan untuk berusaha dan mengembangkan usahanya, terutama para pelaku usaha peternakan,"ujarnya.

Menurutnya, peningkatan populasi ternak tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan hewani masyarakat Kutai Timur, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi peternak lokal agar lebih mandiri dan berdaya saing. Hal ini juga untuk mendukung program unggulan yang di canangkan oleh Pemerintah Daerah

Lebih lanjut, Cut Meutia menyampaikan harapannya terhadap peran peternak dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Ia menekankan pentingnya semangat dan inovasi, khususnya bagi generasi muda, dalam mengembangkan sektor peternakan.

"Harapan kami, para peternak terus bersemangat dan tidak mudah menyerah. Sekarang ini sudah zamannya generasi milenial, jadi peternak tidak harus selalu orang yang sudah tua. Anak-anak muda juga harus berani terjun ke dunia peternakan dengan memanfaatkan teknologi dan manajemen yang lebih modern,"jelasnya.

Ia menambahkan bahwa peran aktif peternak sangat menentukan keberhasilan ketahanan pangan daerah. Dengan meningkatnya produksi dan kualitas ternak lokal, Kutai Timur diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan hewani secara mandiri sekaligus mengurangi ketergantungan dari luar daerah.

"Jika peternak lokal kuat, produksi meningkat, dan kualitas ternak terjaga, maka ketahanan pangan daerah akan semakin kokoh. Inilah yang terus kami dorong melalui pendampingan, bantuan, dan program pembinaan peternak,"pungkasnya.



peningkatan populasi ternak tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan hewani masyarakat Kutai Timur, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi peternak lokal agar lebih mandiri dan berdaya saing. Hal ini juga untuk mendukung program unggulan yang di canangkan oleh Pemerintah Daerah



Cut Meutia

Plt. Kepala Bidang Peternakan DTPHP Kutim



Bibit Ternak Masuk Kutim Wajib Biosecurity

Sangatta - 20 Januari 2025

“

kami juga memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok peternak yang memiliki kemauan untuk berusaha dan mengembangkan usahanya, terutama para pelaku usaha peternakan,”



Dyah Ratnaningrum

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Pernakan Kutai Timur (DTPHP) Kutim

Upaya pencegahan penularan virus mematikan pada hewan ternak terus diperketat di Kabupaten Kutai Timur. Salah satunya melalui protokol biosekuriti yang lebih ketat. Kini, setiap bibit sapi maupun kambing yang didatangkan dari luar wilayah wajib melewati masa isolasi selama empat minggu penuh sebelum dilepas ke masyarakat.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kutai Timur (DTPHP) Kutim, Kutim, Dyah Ratnaningrum melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Peternakan, Cut Meutia menjelaskan, mekanisme karantina ini dilaksanakan dalam dua fase berbeda untuk meminimalkan risiko inkubasi virus selama perjalanan.

Menurutnya, peningkatan populasi ternak tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan hewani masyarakat Kutai Timur, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi peternak lokal agar lebih mandiri dan berdaya saing. Hal ini juga untuk mendukung program unggulan yang di canangkan oleh Pemerintah Daerah

Lebih lanjut, Cut Meutia menyampaikan harapannya terhadap peran peternak dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Ia menekankan pentingnya semangat dan inovasi, khususnya bagi generasi muda, dalam mengembangkan sektor peternakan.

“Harapan kami, para peternak terus bersemangat dan tidak mudah menyerah. Sekarang ini sudah zamannya generasi milenial, jadi peternak tidak harus selalu orang yang sudah tua. Anak-anak muda juga harus berani terjun ke dunia peternakan dengan memanfaatkan teknologi dan manajemen yang lebih modern,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa peran aktif peternak sangat menentukan keberhasilan ketahanan pangan daerah. Dengan meningkatnya produksi dan kualitas ternak lokal, Kutai Timur diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan hewani secara mandiri sekaligus mengurangi ketergantungan dari luar daerah.

“Jika peternak lokal kuat, produksi meningkat, dan kualitas ternak terjaga, maka ketahanan pangan daerah akan semakin kokoh. Inilah yang terus kami dorong melalui pendampingan, bantuan, dan program pembinaan peternak,” pungkasnya.



Lahan Siap, Dokumen Lengkap: Kutim Menanti Survei Pusat Pembangunan Sekolah Rakyat

Sangatta - 21 Januari 2025

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) tengah mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat. Yakni, sebuah program unggulan pemerintah pusat yang diproyeksikan untuk memutus mata rantai kemiskinan. Lahan seluas 8 hektare di kawasan Jalan Simono Sangatta, telah disiapkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas pendidikan.

Kepala Dinas Sosial Kutai Timur, Ernata Hadi Sujito, mengungkapkan bahwa seluruh dokumen pendukung, mulai dari surat permohonan hingga peta lokasi, telah diserahkan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia (KEMENSOS RI). Saat ini, daerah tengah menunggu peninjauan lapangan dari Kementerian PUPR untuk memulai tahap konstruksi fisik.

Kami diminta pusat memfasilitasi ketersediaan lahan dan Bapak Bupati sangat mendukung. Setelah melalui survei tim terpadu, lokasi di Simono dipilih karena statusnya merupakan milik pemerintah daerah yang sudah siap bangun," ujar Ernata saat ditemui awak media di Ruang kerjanya, Rabu (21/01/2026). seluruh biaya operasional, sarana prasarana, hingga

"Misi utama kita adalah mengubah nasib generasi mendatang. Boleh jadi orang tuanya saat ini kurang mampu, namun dengan bekal ijazah dan keterampilan dari sekolah ini, anak-anak mereka diharapkan memiliki pekerjaan layak. Sehingga mampu keluar dari lingkaran kemiskinan," pungkasnya.

Lebih lanjut Ernata menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat ini mengusung konsep asrama penuh yang mencakup jenjang SD, SMP, sampai SMA. Ia mengaku, seluruh biaya operasional, sarana prasarana, hingga konsumsi siswa akan ditanggung sepenuhnya oleh anggaran pusat, sehingga masyarakat tidak dipungut biaya sedikitpun.

"Fasilitas yang akan dibangun sangat lengkap, mulai dari 24 ruang kelas untuk tiga jenjang pendidikan, asrama, dapur umum. Bahkan akan ada lapangan besar utama untuk kegiatan upacara bersama," lanjutnya.

Fokus utama penerima manfaat adalah anak-anak yang terdaftar dalam data kemiskinan ekstrim atau kategori Desil 1 hingga Desil 3, dengan batas maksimal hingga Desil 5 jika kuota belum terpenuhi.

"Data teknis ada di BPS. Karena mereka yang menentukan klasifikasi ekonomi masyarakat. Kami di Dinas Sosial akan mendampingi proses verifikasi dan validasi ke lapangan untuk memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu ini mendapatkan akses pendidikan layak," jelas Ernata.

“

Sekolah Rakyat yang mencakup jenjang SD, SMP, sampai SMA ini, mengusung konsep asrama penuh dan seluruh biaya operasional, sarana prasarana, hingga akomodasi siswa tidak akan di tanggung oleh orang tua siswa melainkan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat.

Ernata Hadi Sujito

Kepala Dinas Sosial Kutai Timur



Tingkatkan Pemahaman Pelaporan Pajak, KKP Bontang Gelar Sosialisasi Aktivasi Akun Coretax bagi ASN Diskominfo Staper Kutim

Sangatta - 21 Januari 2025

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutai Timur mendapat kesempatan berharga dengan mengikuti sosialisasi Aktivasi Akun Wajib Pajak serta Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik pada aplikasi Coretax bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bontang, diruang Rapat Diskominfo Staper, Sangatta, Rabu (21/01/2026)



"Kegiatan ini diperuntukkan bagi pegawai Diskominfo Kutim yang masih belum mengetahui detail pelaporan pajak serta detail lainnya," ujarnya.

Rony Bonar H. Siburian
Kepala Diskominfo Staper Kutim

"Kami di Diskominfo siap membantu penyebarluasan atau diseminasi informasi, jika ada konten-konten edukasi Coretax, kami siap untuk menyebarkan agar mudah dipahami dan dibutuhkan oleh masyarakat," tuturnya

Kegiatan yang di peruntukkan bagi seluruh jajaran pegawai di lingkup Diskominfo Staper ini berlangsung hangat, ringan namun sarat akan informasi yang sangat penting bagi ASN dalam membantu proses pelaporan pajak tahunan yang menjadi kewajiban setiap warga negara.

Kepala Diskominfo Staper Kutim, Rony Bonar H. Siburian, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai terkait tata cara pelaporan pajak, termasuk melakukan aktivasi akun Coretax yang menjadi salah satu syarat sebelum melakukan pelaporan pajak.

Ia berharap melalui sosialisasi ini, seluruh ASN Diskominfo dapat memahami secara baik setiap proses atau tahapan dalam pelaporan pajak. Selain itu, dirinya juga berharap, agar kegiatan ini juga menyasar seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pekab Kutim. selain itu, pihaknya juga terbuka untuk berkolaborasi dalam penyediaan konten-konten edukatif terkait Coretax sebagai bagian dari tugas Diskominfo dalam menyampaikan informasi publik.

Sementara itu, Abdul Muiz, perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bontang, menyampaikan sejak akhir tahun 2025, pihaknya secara rutin melakukan sosialisasi dan pendampingan aktivasi akun Coretax, yang dilanjutkan dengan pendampingan pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak. Coretax sendiri, merupakan aplikasi terbaru DJP yang mengintegrasikan seluruh layanan DJP Online dalam satu sistem. Mulai dari pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, hingga pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, seluruhnya dapat diakses melalui Coretax.

Ia menambahkan, bahwa pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan ke seluruh PD hingga batas akhir pelaporan SPT pada 31 Maret 2026 mendatang. Melalui kegiatan ini, diharapkan ASN di lingkungan Diskominfo Staper Kutai Timur semakin memahami kewajiban perpajakan dan mampu memanfaatkan aplikasi Coretax secara optimal.

"Alhamdulillah, antusias pegawai Diskominfo luar biasa, kami optimis, seluruh ASN akan mampu secara mandiri melaporkan dengan benar dan tepat waktu."

Abdul Muiz

Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bontang





DISKOMINFO
STAPER KUTIM

Kutai Timur Dalam Sepekan

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

Antisipasi Lonjakan Permintaan, Disperindag Kutim Ajukan Tambahan Kuota LPG 3 Kg

Sangatta - 22 Januari 2025

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur (Disperindag Kutim) mengusulkan penambahan kuota gas LPG 3 kilogram kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Usulan ini diajukan sebagai langkah antisipatif untuk menjaga ketersediaan stok di masyarakat, khususnya menjelang hari besar keagamaan yang biasanya memicu lonjakan permintaan.

Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadhani, mengatakan pihaknya telah mengajukan penambahan alokasi sekitar 200 tabung dari kuota yang telah ditetapkan sebelumnya. Meski secara data kuota saat ini dinilai masih mencukupi, peningkatan konsumsi gas sangat bergantung pada momen atau agenda kegiatan tertentu.

Selain persoalan kuota, Nora juga menyoroti usulan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kilogram di tingkat pangkalan. Hal ini menyusul keluhan para pengusaha dan pemilik pangkalan yang menilai HET tidak pernah mengalami perubahan sejak 2019, sementara biaya operasional terus meningkat.

"Para pengusaha mengeluhkan bahwa dengan HET yang berlaku sejak tujuh tahun lalu, perhitungan usaha mereka sudah tidak lagi masuk. Karena itu, kami mengajukan penyesuaian agar mereka tidak merugi dan tetap bisa beroperasi," tambahnya.

Lebih lanjut, Nora menegaskan bahwa kewenangan pengawasan tata kelola migas pada prinsipnya berada di bawah pemerintah pusat melalui Pertamina. Pemerintah daerah hanya berperan dalam membantu koordinasi serta menyampaikan laporan apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan atau permainan harga di lapangan.

"Prinsipnya, yang berwenang mengatur dan menegur adalah pihak pemberi izin. Sementara izin pangkalan dan agen bukan dikeluarkan oleh Disperindag, melainkan oleh Pertamina," pungkasnya.

Kami sudah memohon melalui Bupati ke Provinsi untuk penambahan kuota alokasi kabupaten/kota sebagai langkah antisipasi, karena sirkulasi penggunaan gas sangat bergantung pada momen tertentu

Nora Ramadhani

Kepala Disperindag Kutim



Pemkab Kutim Matangkan Pembangunan RSUD Tipe D di Muara Wahau, AMDAL Ditarget Rampung 2026

Sangatta - 23 Januari 2025

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus mematangkan persiapan pembangunan fasilitas kesehatan yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D yang berlokasi di Kecamatan Muara Wahau.

Kepala Dinas Kesehatan (Kepala Dinkes Kutim), dr. Yuwana Sri Kurniawati, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya terus melakukan langkah strategis untuk segera mewujudkan layanan kesehatan yang representatif dan mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama bagi warga yang ada di tiga Kecamatan, yakni Muara Wahau, Kongbeng dan Telen.

"Saat ini telah memasuki tahap peninjauan lokasi Pembangunan yang ada di Desa Wanasari. Pemerintah menargetkan tahap pembersihan lahan rampung pada tahun 2026 ini, sehingga proses konstruksi fisik dapat segera dimulai pada tahun 2027 mendatang," ujarnya saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Jumat (23/01/2026).

Saat ini, pihaknya juga tengah berkonsentrasi untuk melengkapi berbagai persyaratan salah satunya terkait dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang di targetkan akan selesai di tahun 2026 ini. Mengingat, pembangunan rumah sakit tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

"Oleh karena itu, penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi salah satu tahapan penting yang wajib dipenuhi sebelum pembangunan rumah sakit dilakukan," imbuhnya.

Selain bangunan fisik, mantan Direktur RSUD Kudungga tahun 2021 itu mengaku, pihaknya juga sudah mulai merancang kebutuhan alat kesehatan dan sumber daya manusia (SDM). Untuk tahap awal, RSUD Muara Wahau direncanakan berkapasitas 50 tempat tidur, yang nantinya, secara bertahap akan dikembangkan hingga 100 tempat tidur.

"Kita berharap. Proyek ini dapat menjadi solusi atas terbatasnya fasilitas kesehatan kepada Masyarakat. Kami juga meminta dukungandari seluruh pihak terutama masyarakat agar Pembangunan rumah sakit ini bisa segera diwujudkan," harapnya.

Kehadiran Rumah Sakit ini menjadi bagian dari komitmen bapak Bupati kita (Ardiasnyah Sulaiman) dalam menghadirkan layanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat

“

dr. Yuwana Sri Kurniawati

kepala Dinkes Kutim



**RUMAH SAKIT TIPE D
MUARA WAHAU**

IGD EMERGENCY

APOTIK

INSTALASI GAWAT DARURAT
EMERGENCY

Kutaitimurkab.go.id